Kementerian PPN/
Bappenas

Kebijakan Nasional Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan dalam Dokumen Perencanaan

Oleh:
Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA
Kementerian PPN/Bappenas

Balikpapan, 2 Desember 2022

OUTLINE

1. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN
2. TRANSFORMASI EKONOMI BIRU
3. PENUTUP

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI LANDASAN PERWUJUDAN VISI INDONESIA 2045

Kementerian PPN/ Bappenas

2030

- Tindonesia ermasuk dari 193 negara yg berkomitmen terhadap Tujuan Penbangunan Berkelanjutan (SDGs)
- Mencapai target2 SDGs merupakan landasan mewujudkan Visi 2045 & komitmen global lainnya (al. *Paris Agreement*)

2045

- Ekonomi terbesar ke 5 dunia
- Digerakkan oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, **maritim**, dan jasa.
- PDB/kapita $23,199 (USD 7.4T)
- Penduduk 319 juta jiwa, 70%kelas menengah

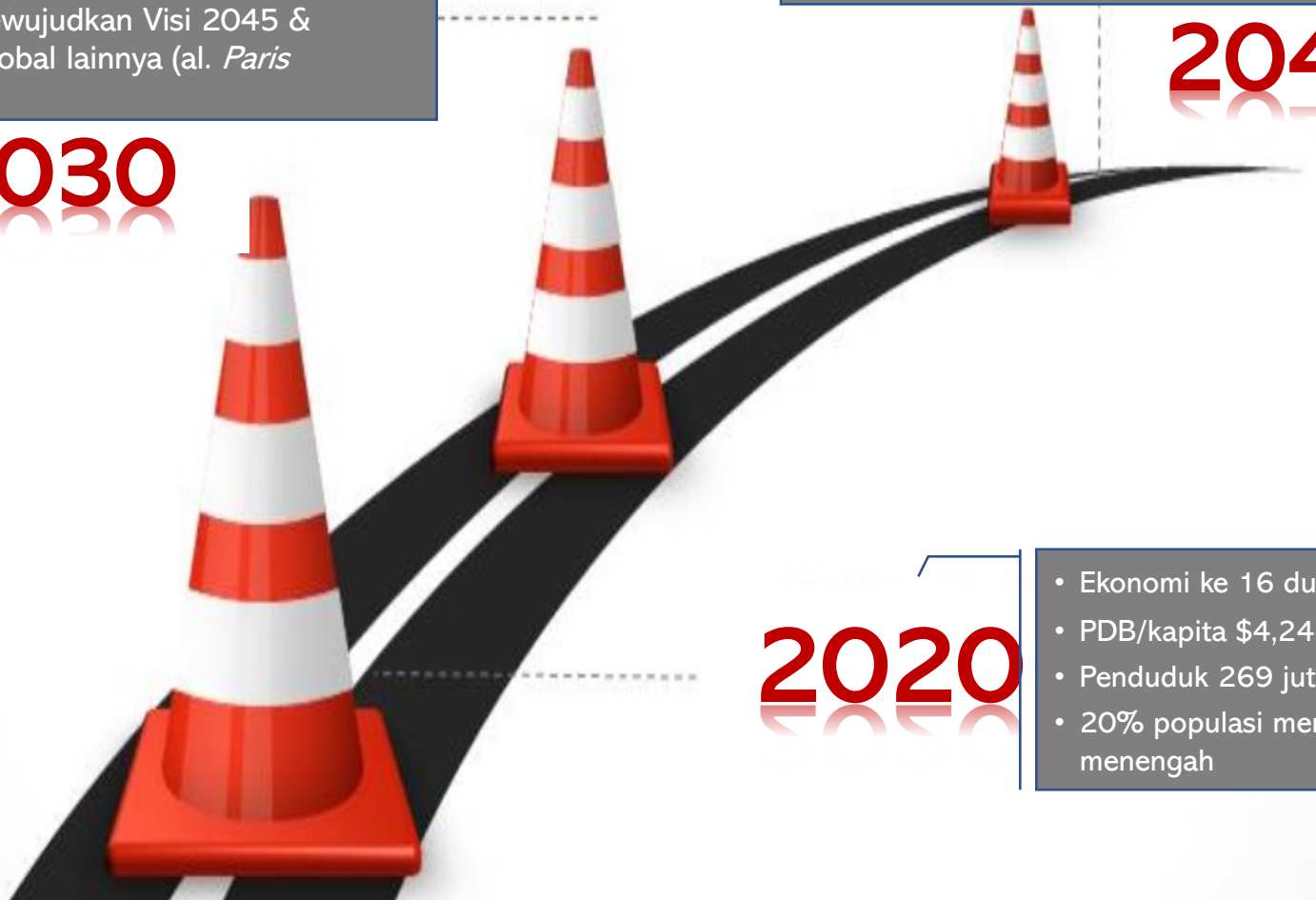

2020

- Ekonomi ke 16 dunia
- PDB/kapita $4,244
- Penduduk 269 juta jiwa
- 20% populasi merupakan kelas menengah

Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:

PDB Riil	PDB Riil / Kapita
5,7%	5,0%

Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan **kemajuan teknologi dimanfaatkan** untuk mempercepat pembangunan ekonomi

Prasyarat: SDM yang berkualitas, produktif, dan menguasai teknologi

VISI 2045 TERKAIT KEMARITIMAN

Kemaritiman menjadi prioritas pembangunan di Masa Depan. Indonesia dalam jalan panjang **membangun ekonomi maritim yang pesat**, **kekuatan maritim yang kokoh,** dan **peradaban maritim yang kuat**.

STRATEGI PEMBANGUNAN MARITIM

Ekonomi Maritim: meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5 persen PDB pada tahun 2045 dengan fokus pada (1) pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, (2) industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, dan (3) pariwisata bahari yang inklusif.

Peradaban Maritim: menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.

Kekuatan Maritim: mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional dan global.

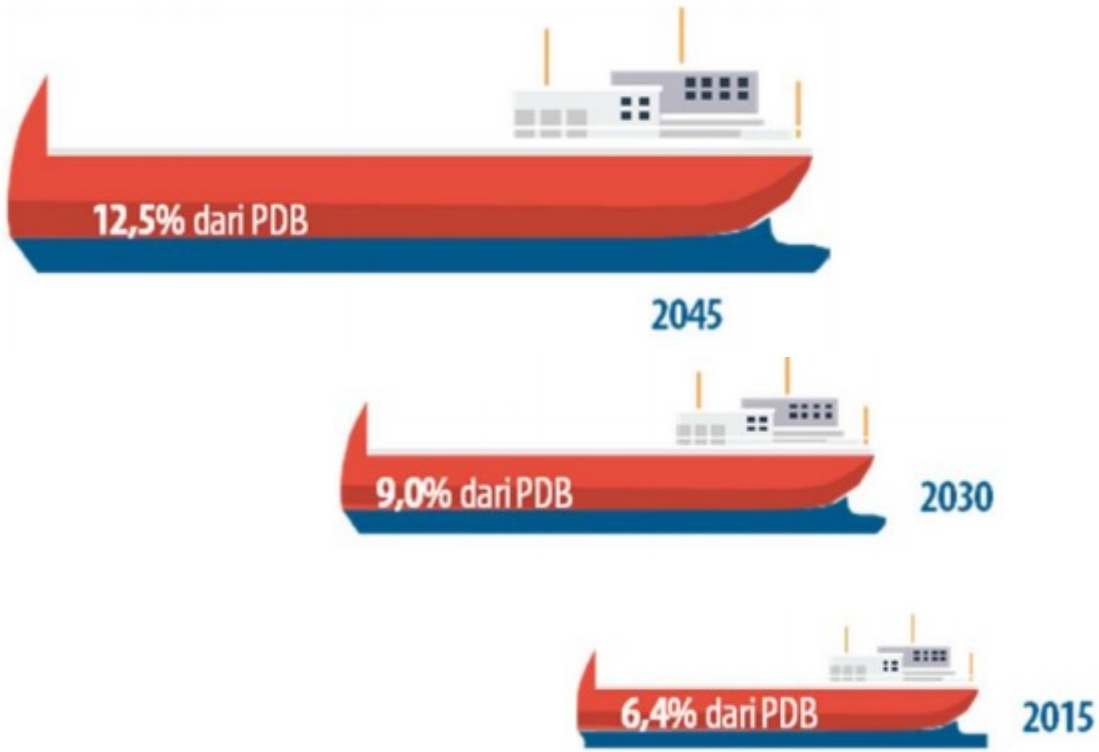

Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4% tahun 2015 menjadi 12,5% tahun 2045.

Kerangka Pembangunan Kemaritiman

Kementerian PPN/ Bappenas

TUJUAN

Visi Jangka Panjang Pembangunan Indonesia 2005-2025

- **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional**

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia
2. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan IPTEK
3. Menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara
4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan
5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut

STRATEGI UTAMA

MEMPERKUAT POLITIK MARITIM

MEMPERKUAT EKONOMI MARITIM

Subtansi Kelautan dan UU-IKN

Pasal 6

(1) Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:

a. Bagian Utara pada 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan;

b. Bagian Selatan pada 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25.260" Lintang Selatan;

c. Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan; dan

d. Bagian Timur pada 117° 18' 28.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

(2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektar), dengan batas wilayah:

a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

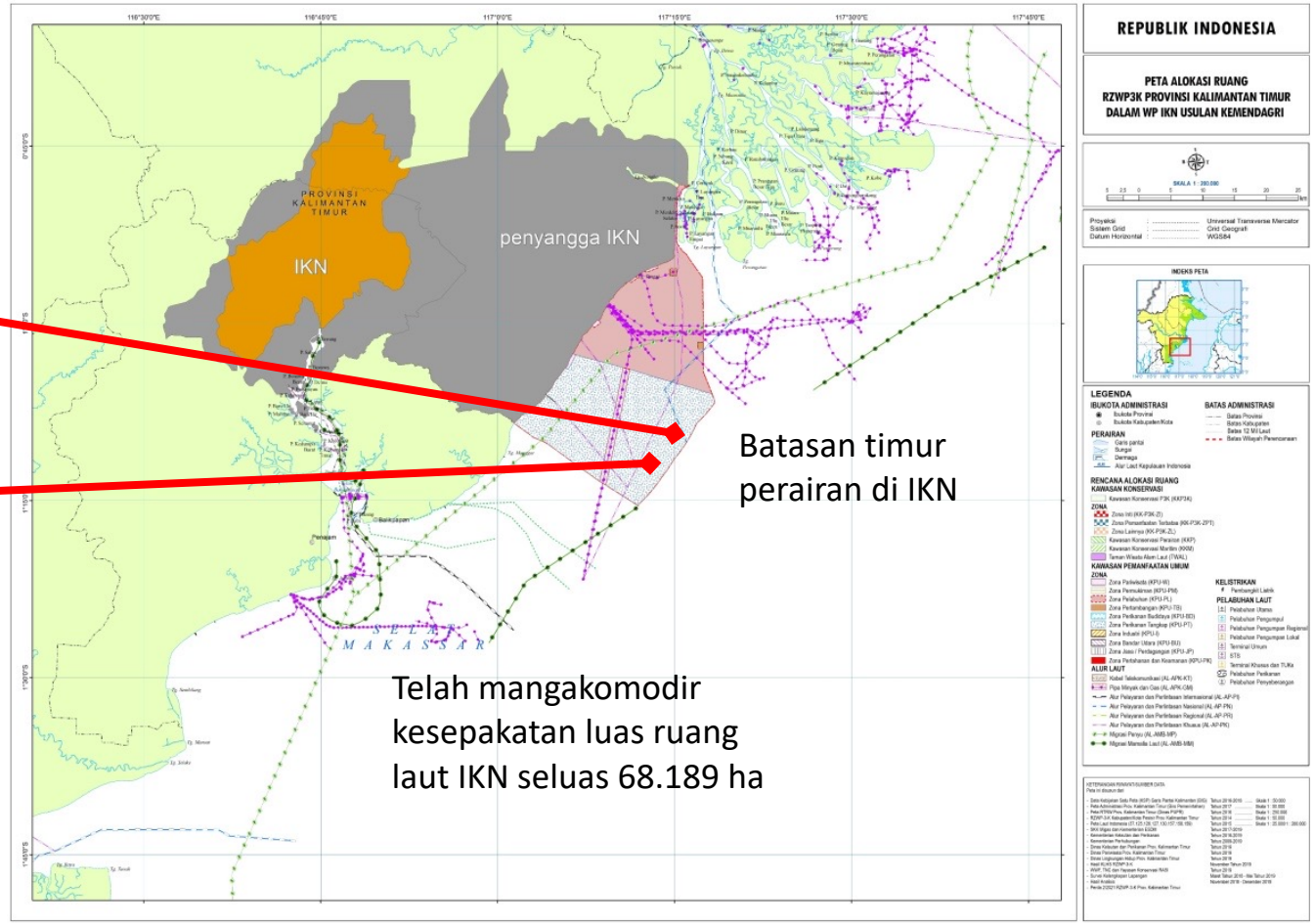

Isu Strategis Wilayah Perairan IKN

- Tidak tertatanya pengembangan dan pemanfaatan ruang laut di kawasan IKN di wilayah laut
- Masih rendahnya nilai produksi dan industry pengolahan hasil perikanan di wilayah laut IKN
- Belum tersedianya sentra kelautan dan perikanan di wilayah laut IKN
- Penyedia pangan hasil perikanan laut bagi IKN
- Kawasan laut perairan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan tengah Indonesia dengan posisi wilayah sangat strategis (Jalur ALKI, dekat dengan Makassar, batimetri yang cukup dalam untuk alur pelayaran kapal besar)
- Potensi pengembangan teknologi energI terbarukan untuk mendukung visi IKN yang berkelanjutan
- Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat pesisir
- Budaya masyarakat pesisir yang perlu dipertahankan
- Diperlukannya penataan kawasan pemukiman nelayan di atas permukaan laut
- Habitat dugong, pesut, dan penyu sebagai biota endemic dan dilindungi di wilayah Teluk Balikpapan dan Delta Mahakam terancam keberadaannya
- Ekosistem pesisir terdampak limbah dari kegiatan pemanfaatan ruang baik di wilayah daratan maupun di perairan laut seperti kepelabuhanan, pertambangan minyak dan gas serta batubara

EKONOMI BIRU SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERKELANJUTAN

Kementerian PPN/ Bappenas

SDGs *Goal* 14. Life Below Water

Menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan ekologi sangat penting bagi pemanfaatan sumberdaya maritim dan kelautan yang berkelanjutan

Blue Economy

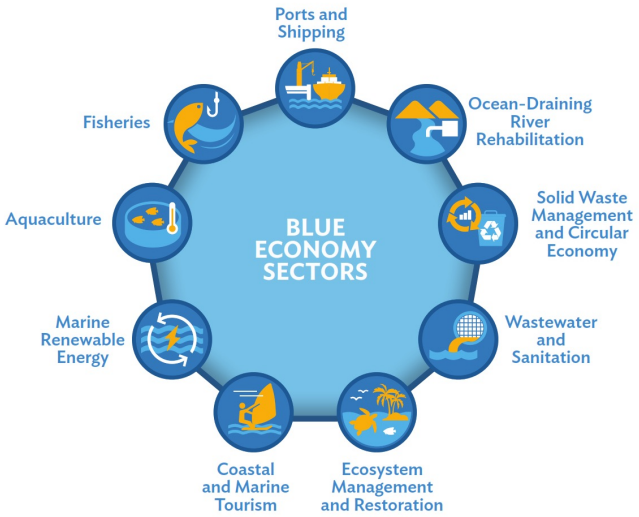

Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia mencakup 11 sektor dengan nilai sekitar USD 1.33 triliun dan kesempatan kerja bagi 45 juta orang (perikanan tangkap, aquaculture, industry pengolahan ikan, wisata marine, dan jasa lingkungan)

Blue Economy Development Framework, diluncurkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 25 November 2021. Sebagai new *engine of growth* pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia

Blue Finance Instruments Development Guideline, diluncurkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 1 November 2022. Sebagai dasar pengem-bangan pembiayaan inovatif program2 berkelanjutan dg *blue focus.*

BEBERAPA STRATEGI BLUE ECONOMY DAN BLUE FINANCING KE DEPAN

Ministry of National Development Planning/Bappenas
Republic of Indonesia
Kementerian PPN/ Bappenas

CREATING ADDED VALUE AND INCREASING MARINE-BASED ECONOMIC PRODUCTIVITY

SDGs Government Security Framework

Blue Focus/Projects

MENUJU NEGARA PENDAPATAN TINGGI

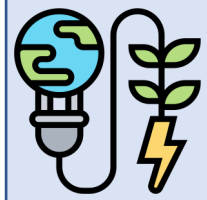

Mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial & peningkatan, serta selaras dengan memastikan keberlanjutan laut dan daerah pesisir.

Menanggulangi polusi laut dalam segala bentuk, selaras upaya peningkatan nilai tambah ekonomi

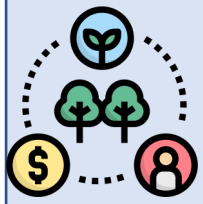

Meletakan landasan strategis bagi transformasi ekonomi

KONTRIBUSI EKONOMI BIRU TERHADAP MASYARAKAT LOKAL

Kementerian PPN/ Bappenas

Fokus Ekonomi Biru

1. Bagaimana dan oleh siapa pembangunan kelautan dilaksanakan.
2. Siapa saja yang memperoleh keuntungan dari pembangunan kelautan.
3. Bagaimana meminimalisir kerugian dan ancaman terhadap pembangunan kelautan.
4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial kelautan.
5. Bagaimana peran Pemerintah dalam mendukung Ekonomi Biru.

Masyarakat Pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru

Ekonomi Biru dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang **hidup berdampingan** dengan sumber daya pesisir dan laut.

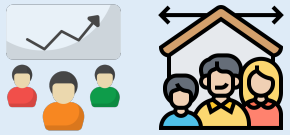

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir oleh **Pemerintah**

- Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dengan memahami prinsip keberlanjutan
- Cara berpartisipasi dalam menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim
- Melawan kasus pelanggaran kelautan dan perikanan seperti IUU Fishing

Kementerian PPN/
Bappenas

Terima Kasih